PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13, Number 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

KOLABORASI BALAI PELATIHAN VOKASI PRODUKTIVITAS (BPVP) BANYUWANGI DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

COLLABORATION BETWEEN THE BANYUWANGI PRODUCTIVITY VOCATIONAL TRAINING CENTER (BPVP) AND THE BUSINESS AND INDUSTRIAL WORLD IN REDUCING UNEMPLOYMENT IN BANYUWANGI REGENCY

Hilga Cahaya Anastiya Pranata [1*], Niko Pahlevi Hentika [2], Erna Agustina [3]

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia [1,2,3]

*Corresponding author: hilgacahayaaa@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted:
July 29, 2026
Review:
September 1, 2026
Accepted:
October 1, 2026
Available online:
October 30, 2026

Article Citation (APA) :
Pranata, H., Hentika, N., & Agustina, E. (2026). Kolaborasi Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Banyuwangi Dengan Dunia Usaha Dan Industri Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 1-12. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.772

DOI:
https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.772

ABSTRAK

Pengangguran di Kabupaten Banyuwangi masih terjadi karena kemampuan pekerja tidak selaras dengan kebutuhan perusahaan dan industri. Meskipun BPVP Banyuwangi sudah melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi dan bekerja sama dengan DUDI, sampai saat ini belum banyak penelitian yang mengeksplorasi sejauh mana kerja sama tersebut dapat membantu mengurangi angka pengangguran dari sudut pandang Collaborative Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara BPVP Banyuwangi dan DUDI dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran, dengan menggunakan kerangka kerja Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Informan dipilih dengan cara purposive dari unsur BPVP dan DUDI yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kerja sama pelatihan vokasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengurangi data, menampilkan data, serta mengambil dan memverifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama telah dilakukan dengan cara menyelaraskan kurikulum, memberikan pelatihan berdasarkan kompetensi, menyelenggarakan program magang di industri, memberikan sertifikasi kompetensi, serta memasukkan lulusan ke dalam dunia kerja. Namun, kerja sama belum berjalan dengan baik karena masih ada perbedaan dalam kemampuan lembaga antara BPVP dan DUDI, partisipasi industri yang belum merata, mekanisme koordinasi yang belum stabil, serta kerja sama dan komitmen antar pihak yang masih terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa mengurangi pengangguran membutuhkan kerja sama yang terus-menerus antara BPVP, pemerintah daerah, dan DUDI untuk meningkatkan jumlah orang yang bisa memperoleh pekerjaan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance,* BPVP Banyuwangi, DUDI, pelatihan vokasi, pengangguran

ABSTRACT

Unemployment in Banyuwangi Regency is still affected by the mismatch between the skills of the workforce and the needs of businesses and industries. Even though BPVP Banyuwangi has conducted

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

competency-based training and partnered with DUDI, the effectiveness of this collaboration in reducing unemployment has not been much studied from the perspective of Collaborative Governance. This study aims to analyze the collaboration between BPVP Banyuwangi and DUDI in efforts to reduce unemployment, using the Collaborative Governance framework by Ansell and Gash. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques involving in-depth interviews, observations, and documentation. Informan were selected purposefully from the elements of BPVP and DUDI that were directly involved in carrying out the training collaboration activities. Data analysis is done through data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. Research results show that collaboration has been carried out through curriculum alignment, competency-based training, industrial internship programs, competency certification, and placement of graduates into the workforce. However, the collaboration is not yet running smoothly because there are still differences in institutional capacity between BPVP and DUDI, uneven involvement from the industry, an ongoing coordination mechanism, and limited dialogue and commitment among the stakeholders. This study concludes that reducing unemployment requires ongoing institutional collaboration between BPVP, local governments, and DUDI to improve job absorption.

***Keywords**: Collaborative Governance, BPVP Banyuwangi, DUDI, vocational training, unemployment*

PENDAHULUAN

Pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia karena berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kemiskinan dan kesenjangan sosial (Pratama & Hendrawan, 2024). Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi di sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi angka pengangguran karena masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja belum diikuti oleh kesiapan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Satria & Wibowo, 2021).

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri agar proses pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Iskandar, 2025). Salah satu lembaga yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi (Alfaritdzi & Prathama, 2023). BPVP menyelenggarakan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi serta menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat (Malik & Ilma, 2024).

Meskipun berbagai program pelatihan telah dilaksanakan, angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi masih mengalami fluktuasi (Rachman & Huda, 2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat hingga mencapai 5,42% pada tahun 2021 sebelum akhirnya menurun menjadi 4,03% pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan, namun belum cukup untuk menggambarkan bahwa kolaborasi antara BPVP dan dunia usaha serta dunia industri telah berjalan secara optimal. (Anggraini et al., 2026)

Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab Banyuwangi Tahun 2017–2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Jumlah Jiwa
2017	1,73	27.840
2018	3,59	33.114
2019	3,95	37.054
2020	5,34	49.252
2021	5,42	94.850
2022	5,26	49.129
2023	4,75	84.075
2024	4,03	71.748

Sumber: Data Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kemampuan mereka dalam bersaing di pasar kerja. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan kemampuan peserta sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja. Dalam konteks tersebut, Aliyah (2025) menjelaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi membantu meningkatkan keterampilan teknis, produktivitas, serta kesiapan kerja peserta pelatihan. Hafid (2025) menegaskan bahwa partisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam membuat kurikulum, memberikan instruktur, serta mengadakan praktik kerja lapangan merupakan hal penting untuk meningkatkan kesesuaian pelatihan vokasi dengan kebutuhan sektor industri.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri dapat membuka akses informasi pekerjaan yang lebih luas, memperkuat jaringan penempatan tenaga kerja, serta meningkatkan kesempatan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan. Maris & Rahmi (2022) menemukan bahwa kerja sama antara lembaga pelatihan dengan DUDI berhasil meningkatkan kemampuan pekerja dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Sementara itu, Sobari (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan industri dalam proses pelatihan bisa meningkatkan kemampuan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun begitu, sebagian besar penelitian tersebut tetap memfokuskan pada efektivitas program pelatihan, tingkat penyerapan lulusan, dan hasil pelatihan secara kuantitatif. Penelitian tentang proses kerja sama antaraktor, cara berinteraksi, dan cara mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelatihan vokasi masih belum banyak dilakukan.

Dalam perkembangan studi tentang pengelolaan pemerintahan, pendekatan Kolaboratif Governance digunakan untuk menjelaskan cara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang mengenai masyarakat umum. Nurmaya (2025) menyebutkan bahwa berhasilnya kerja sama bergantung pada kondisi awal yang baik, struktur organisasi yang dirancang dengan tepat, kepemimpinan yang mendukung, serta proses kerja sama yang melibatkan komunikasi langsung, membangun kepercayaan, kesepakatan bersama, dan pemahaman yang sama. Pendekatan ini umum

digunakan dalam bidang pelayanan publik, lingkungan, dan pembangunan daerah, namun penerapannya dalam konteks pelatihan vokasi dan pengurangan pengangguran di tingkat daerah masih belum banyak dibahas.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa penelitian tentang pelatihan vokasi sudah berkembang cukup luas, tetapi fokus utamanya masih terletak pada aspek hasil dari pelatihan tersebut. Penelitian yang menggabungkan analisis kerja sama lembaga antara BPVP dan kalangan usaha serta industri dengan pendekatan Collaborative Governance dalam konteks mengurangi pengangguran di daerah masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukannya penelitian lebih lanjut agar dapat memahami bagaimana kerja sama antar berbagai pihak memengaruhi keberhasilan program pelatihan vokasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan vokasi dan kerja sama dengan dunia usaha serta dunia industri memengaruhi peningkatan kemampuan dan kesempatan kerja para lulusan. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian lebih banyak mengevaluasi efektivitas pelatihan dengan melihat peningkatan kemampuan atau tingkat pekerjaan yang berhasil diperoleh lulusanv(Saweho et al., 2025). Kedua, hubungan antara lembaga pelatihan dan dunia usaha serta dunia industri umumnya dianggap sebagai kerja sama biasa, tanpa menganalisis secara mendalam proses kolaborasi antar pihak (Listianto et al., 2026). Ketiga, penelitian sebelumnya belum banyak membahas peran kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang mendukung, dan proses kerja sama dalam menentukan keberhasilan program pelatihan vokasi (Wrahatnolo et al., n.d.). Empat, penelitian langsung yang khusus mempelajari kerja sama BPVP Banyuwangi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut masih sangat sedikit (Ahmadi, n.d.).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian karena belum ada penelitian yang secara menyeluruh menganalisis kerja sama antara BPVP Banyuwangi dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan menggunakan pendekatan Collaborative Governance, untuk menjelaskan kontribusi kerja sama tersebut dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menekankan fokus dan cara menganalisis yang digunakan. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi hasil dari pelatihan vokasi saja, tetapi juga secara mendalam menganalisis bagaimana kerja sama antara BPVP Banyuwangi dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kedua, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash untuk mengidentifikasi kondisi awal kolaborasi, desain sistem organisasi, kepemimpinan yang mendukung, interaksi berdialog secara kolaboratif, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama yang tercipta antar para pihak. Ketiga, penelitian ini memberikan bukti nyata di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, sehingga membantu memahami lebih baik hubungan antara pelatihan vokasi dan penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Secara teori, penelitian ini mengembangkan penggunaan teori Pemerintahan Kolaboratif dalam bidang pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan daerahc (Silayar et al., 2021). Secara nyata, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi BPVP Banyuwangi, pemerintah setempat, serta kalangan usaha dan industri dalam menciptakan kerja sama yang lebih baik untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang proses, makna, interaksi, serta dinamika kerja sama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan lebih fokus pada penggambaran dan penafsiran fenomena kolaborasi berdasarkan pengalaman dan pandangan dari para pelaku yang terlibat (Setiyani et al., 2026).

Penelitian ini dilakukan di BPVP Banyuwangi serta beberapa perusahaan mitra DUDI yang bekerja sama dengan BPVP dalam membuat kurikulum, mengadakan pelatihan, program magang, sertifikasi kompetensi, dan menempatkan lulusan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa BPVP Banyuwangi adalah lembaga pelatihan vokasi pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja daerah, sedangkan perusahaan mitra dipilih karena secara langsung terlibat dalam proses kerja sama pelatihan vokasi. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari–Juli 2026.

Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Subjek penelitian adalah para aktor yang secara langsung terlibat dalam proses kerja sama antara BPVP dan DUDI. Informan dipilih dengan cara purposive sampling, artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021). Kriteria informan mencakup: (1) memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam mengurus pelatihan vokasi (2) terlibat dalam kerja sama antara BPVP dengan DUDI (3) memahami cara merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menempatkan lulusan ke tempat kerja serta (4) bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka.

Informan penelitian terdiri dari kepala atau pejabat struktural di BPVP Banyuwangi yang bertanggung jawab atas pelatihan dan kerja sama dengan industri, instruktur BPVP Banyuwangi yang mengajar dalam program pelatihan berbasis kompetensi, perwakilan perusahaan mitra DUDI yang terlibat dalam menyusun kurikulum, melaksanakan magang, serta rekrutmen tenaga kerja, dan staf atau pihak yang menangani penempatan kerja serta hubungan industri di BPVP Banyuwangi. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan terlibat langsung dalam proses kerja sama antara BPVP dengan dunia usaha dan dunia industri. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap sampai data yang terkumpul menunjukkan adanya informasi yang diulang terus-menerus (*data saturation*).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Sulung & Muspawi, 2024).

a. Data primer didapatkan secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara yang mendalam serta pengamatan di lapangan. Data primer mencakup informasi mengenai kondisi awal kerja sama antar institusi, jenis bentuk kolaborasi yang dilakukan, bagaimana peran masing-masing pihak dibagi, cara mengkoordinasikan kegiatan, proses penyusunan kurikulum, pelaksanaan program magang, prosedur

sertifikasi kompetensi, tempat penempatan lulusan, masalah yang ditemui dalam kerja sama, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut.

b. Data sekunder didapat dari berbagai dokumen resmi seperti BPVP Banyuwangi, laporan program pelatihan, data ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi, Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, laporan evaluasi program, serta referensi ilmiah yang berkaitan dengan pelatihan vokasi, angka pengangguran, dan pemerintahan kolaboratif.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, mengamati langsung, dan mencatat semua dokumen yang relevan. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur kepada pengelola BPVP, instruktur, dan perwakilan DUDI guna mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama tersebut. Observasi dilakukan langsung dalam kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, forum koordinasi, serta aktivitas magang industri. Dokumentasi dipakai untuk melengkapi informasi dari hasil wawancara dan pengamatan, dengan meninjau berbagai dokumen seperti MoU, PKS, kurikulum pelatihan, laporan program, serta data tentang pemakaian tenaga kerja (Zahroh et al., 2025).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan melalui beberapa tahapan, yaitu mengurangi data, menyajikan data, serta membuat dan memverifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan mengelompokkan data sesuai dengan tema yang terkait dengan indikator Kolaboratif Governance. Data yang sudah disederhanakan kemudian ditampilkan dalam bentuk narasi dan matriks tema agar lebih mudah mengenali pola hubungan antar faktor. Selanjutnya, kesimpulan dilakukan dengan terus-menerus membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (P. C. Susanto et al., 2024).

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui beberapa teknik. Pertama, dilakukan pengecekan sumber dengan membandingkan informasi dari BPVP, instruktur, dan pihak DUDI. Kedua, teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, peneliti melakukan pemeriksaan member dengan meminta informan memeriksa kembali ringkasan hasil wawancara agar dapat memastikan bahwa makna yang tertera sesuai dengan yang sebenarnya. Keempat, peneliti memastikan kebenaran hasil dengan menggunakan audit trail yang mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen pendukung, serta proses analisis data, sehingga semua temuan bisa dicek dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah (D. Susanto & Jailani, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal *(Starting Condition)*

Menurut (Ansell & Gash, 2008), kondisi awal adalah situasi yang mendasari terbentuknya tata kelola kolaboratif. Kondisi awal tersebut mencakup perbedaan dalam kemampuan sumber daya, ketidakseimbangan dalam kekuasaan, pengalaman bekerja sama sebelumnya, serta ketergantungan saling antara para pihak dalam memecahkan suatu

masalah. Penelitian ini dimulai dari kerja sama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), karena adanya masalah pengangguran yang tinggi di Kabupaten Banyuwangi.Hal ini terjadi karena ada kesenjangan antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan hasil wawancara, BPVP Banyuwangi bertugas sebagai penyelenggara pelatihan berdasarkan kompetensi, dengan menyediakan instruktur, fasilitas pelatihan, serta program sertifikasi. Di sisi lain, DUDI memiliki data mengenai perkembangan teknologi, standar kemampuan, dan kebutuhan pekerja yang terus berubah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda, sehingga perlu kolaborasi agar tujuan meningkatkan kemampuan tenaga kerja bisa tercapai.

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala BPVP Banyuwangi



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026.

Hasil wawancara dengan Kepala BPVP Banyuwangi menunjukkan bahwa BPVP memiliki peran penting sebagai penyelenggara pelatihan vokasi yang berbasis pada kompetensi, serta bertugas sebagai pihak yang mengkoordinasikan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Informasi yang didapat dari wawancara tersebut mendukung hasil penelitian bahwa BPVP perlu masukan dari DUDI mengenai kebutuhan kompetensi tenaga kerja, sementara DUDI membutuhkan BPVP sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun BPVP sudah berusaha membuat kurikulum pelatihan bersama DUDI, perubahan kebutuhan kompetensi di sektor industri terjadi sangat cepat. Perkembangan teknologi dalam produksi, perubahan cara kerja, dan munculnya keterampilan baru membuat kurikulum pelatihan masih kurang mampu memenuhi kebutuhan industri secara terus-menerus. Selain itu, kurangnya fasilitas praktik dan dana untuk pelatihan membuat proses penyesuaian kurikulum tidak bisa berjalan dengan baik di seluruh program pelatihan.

Temuan itu sesuai dengan data lapangan kerja di Kabupaten Banyuwangi yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 4,03% pada tahun 2024, setelah sebelumnya mencapai 5,42% pada tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kondisi ketenagakerjaan telah membaik, kerja sama yang lebih kuat antara BPVP dan DUDI tetap diperlukan agar penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kondisi awal, terdapat perbedaan dalam kapasitas kelembagaan antara BPVP Banyuwangi dan DUDI. BPVP memiliki tugas untuk mengelola pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja, sementara DUDI memiliki kemampuan dalam memberikan informasi tentang kebutuhan kemampuan dan

peluang kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja sama terbentuk karena perbedaan kemampuan lembaga dan kebutuhan untuk menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan industri.

Desain Kelembagaan *(Institutional Design)*

Menurut Ansell & Gash (2008), desain institusional adalah aturan dasar yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kerja sama. Desain kelembagaan mencakup perjelasan aturan, penentuan tugas masing-masing pihak, cara bekerja sama, serta perjanjian resmi yang disetujui oleh semua pihak agar kerja sama dapat berjalan dengan baik dan terus-menerus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kerja sama antara BPVP Banyuwangi dengan DUDI sudah memiliki dasar hukum berupa Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan cakupan kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jenis kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan pelatihan vokasi.

Gambar 2. Wawancara dengan perwakilan DUDI



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026.

Dokumentasi wawancara dengan perwakilan DUDI menunjukkan bahwa pihak industri terlibat dalam pelaksanaan kerja sama dengan BPVP Banyuwangi. Informasi yang didapat dari wawancara tersebut memperkuat hasil bahwa DUDI bertanggung jawab dalam menyediakan tempat magang, menyesuaikan kebutuhan kompetensi, serta menyerap tenaga kerja yang lulus dari pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, BPVP Banyuwangi bertugas sebagai penyelenggara pelatihan yang berbasis kompetensi, dengan menyediakan instruktur, fasilitas untuk pelatihan, serta program sertifikasi. Sementara itu, DUDI bertugas memberikan informasi tentang kebutuhan kemampuan tenaga kerja, membantu membuat kurikulum, menyediakan tempat praktik kerja, serta membuka kesempatan kerja bagi lulusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desain kelembagaan belum berjalan dengan sempurna. Tidak semua perusahaan memiliki tingkat keikutsertaan yang sama pada setiap tahap pelatihan. Beberapa perusahaan hanya ikut serta pada bagian tertentu, misalnya menyediakan tempat magang atau mempekerjakan tenaga kerja, sedangkan partisipasi mereka dalam membuat kurikulum atau mengevaluasi pelatihan masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam aspek desain institusi terlihat bahwa kerja sama antara BPVP Banyuwangi dan DUDI didukung oleh aturan resmi seperti MoU dan PKS. Namun, penerapan desain kelembagaan belum sepenuhnya baik karena mekanisme kerja

sama dan komitmen resmi antar mitra masih beragam, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan masing-masing.

Proses Kolaboratif *(Collaborative Process)*

Menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaboratif merupakan bagian utama dari pemerintahan kolaboratif yang ditunjukkan dengan adanya komunikasi langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, serta mencapai hasil sementara.

Berdasarkan hasil penelitian, BPVP Banyuwangi telah melakukan beberapa jenis kerja sama dengan DUDI, seperti mengadakan forum diskusi, menggelar rapat koordinasi, menyusun kebutuhan pelatihan, serta berkomunikasi mengenai pelaksanaan magang dan penempatan lulusan. Melalui kegiatan tersebut, BPVP mencoba menghubungkan kebutuhan industri dengan program pelatihan yang diadakan.

Namun, proses kerja sama masih belum berjalan dengan baik secara maksimal. Partisipasi DUDI masih lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan pelatihan dan rekrutmen tenaga kerja, sedangkan pada tahap perencanaan program, penyusunan kurikulum, hingga evaluasi hasil pelatihan, belum semua mitra berpartisipasi secara aktif. Akibatnya, komunikasi yang terjadi masih hanya terbatas pada situasi tertentu dan belum terjadi secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara BPVP Banyuwangi dan DUDI sudah berjalan dengan berbagai cara komunikasi dan koordinasi. Namun, peran BPVP sebagai pihak yang memfasilitasi kolaborasi masih belum cukup baik karena semua mitra belum terlibat secara merata dalam setiap tahapan kerja sama.

Kepemimpinan Fasilitatif *(Facilitative Leadership)*

Menurut Ansell & Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif bertujuan mendorong terjadinya dialog, membangun kepercayaan antar pihak, menyelesaikan perbedaan kepentingan, serta memastikan semua pihak yang terlibat tetap berkomitmen dalam proses kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian, pimpinan BPVP Banyuwangi telah berusaha membangun komunikasi dengan DUDI melalui berbagai forum koordinasi, pembuatan program pelatihan, serta pelaksanaan kerja sama. BPVP juga memberi kesempatan bagi DUDI untuk menyampaikan masukan mengenai kebutuhan kemampuan tenaga kerja, sehingga pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Meskipun begitu, cara kepemimpinan yang dilakukan masih belum bisa membangun hubungan kerja sama yang kuat secara sempurna. Intensitas pembicaraan antara BPVP dan semua mitra industri masih rendah, sehingga bukan semua perusahaan terlibat secara aktif dalam mengambil keputusan. Tingkat kepercayaan antaraktor masih meningkat karena partisipasi industri lebih banyak didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja perusahaan masing-masing dibandingkan komitmen jangka panjang untuk pengembangan pelatihan vokasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fasilitatif BPVP Banyuwangi sudah berusaha membangun komunikasi dan kerja sama dengan DUDI. Namun, komunikasi, kepercayaan, dan komitmen antara BPVP dengan DUDI masih kurang memadai, sehingga kepemimpinan yang bersifat fasilitatif belum mampu menghasilkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan peran pemimpin agar semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pengurangan pengangguran dengan cara memberikan pelatihan vokasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

(DUDI) dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, dengan menggunakan pendekatan Collaborative Governance yang diusulkan oleh Ansell & Gash (2008). Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut berhasil dicapai dengan mengenali kondisi awal kerja sama, merancang struktur organisasi, proses kerja sama, serta kepemimpinan yang mendukung yang terjadi antara BPVP Banyuwangi dan DUDI.

Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama BPVP Banyuwangi dengan DUDI sudah berjalan dengan baik melalui penyelarasan kurikulum pelatihan, pelatihan yang berbasis kompetensi, program magang di industri, pemberian sertifikasi kompetensi, serta penempatan lulusan untuk bekerja di dunia usaha. Namun, penelitian ini juga menyelesaikan permasalahan yang dibahas, yaitu bahwa kerja sama tersebut belum berjalan dengan baik. Dalam hal kondisi awal, masih ada perbedaan dalam kemampuan lembaga antara BPVP dan DUDI, serta kurikulum pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah dan berkembang. Dalam hal desain institusional, kerja sama didukung melalui MoU dan PKS, tetapi pembagian tugas, cara berkoordinasi, serta komitmen resmi antar pihak masih belum berjalan dengan konsisten. Dalam proses kolaboratif, peran DUDI masih lebih banyak terlihat pada tahap pelaksanaan pelatihan dan perekrutan tenaga kerja, sedangkan partisipasinya pada tahap perencanaan dan evaluasi belum terdistribusi secara merata. Sementara itu, di aspek kepemimpinan fasilitatif, dialog, kepercayaan, dan komitmen antar pihak masih terbatas, sehingga hubungan kerja sama belum begitu berkelanjutan.

Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dianggap tepat karena mampu mengungkap secara mendalam pengalaman, persepsi, serta dinamika hubungan antaraktor dalam pelaksanaan kolaborasi. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi membantu peneliti mendapatkan data nyata mengenai cara kerja sama yang tidak bisa dijelaskan dengan baik menggunakan pendekatan berbasis angka.

Secara teori, penelitian ini memperkuat penggunaan teori Kolaboratif Governance dalam bidang pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan daerah, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama antar lembaga bergantung pada kesesuaian kapasitas lembaga, kejelasan tentang cara kerja sama, tingkat komunikasi yang aktif, serta kepemimpinan yang mendukung dan memfasilitasi. Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa mengurangi pengangguran tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan vokasi, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang terus-menerus antara BPVP, pemerintah daerah, dan DUDI.

Berdasarkan hasil penelitian, dianjurkan agar BPVP Banyuwangi membuat pertemuan rutin dengan DUDI setidaknya setiap semester untuk menyelaraskan kurikulum dan mengevaluasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja. BPVP juga harus membuat sistem pengawasan dan penilaian bersama terhadap pelaksanaan magang dan penempatan lulusan agar tingkat penyerapan tenaga kerja bisa diukur secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membantu mendorong kerja sama dengan sektor-sektor industri utama di Banyuwangi, terutama pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, dengan memberikan insentif berupa pelatihan serta bantuan dalam menempatkan tenaga kerja. Bagi DUDI, peningkatan partisipasi pada tahap perencanaan, penyusunan kurikulum, dan pelaksanaan program pendidikan merupakan hal yang penting dan evaluasi pelatihan perlu dilakukan agar program pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, K. (n.d.). *RPJMD kabupaten banyuwangi*.

Alfaritdzi, R. M., & Prathama, A. (2023). Peran Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) Dalam Mengurangi Angka Pengangguran. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(1), 111–118.

Aliyah, K., Yusuf, A., & Wiryanto, D. (2025). Pengaruh pelatihan, employability skills dan motivasi terhadap kesiapan kerja peserta pelatihan di bbpvp semarang. *Jurnal*

Education and Development, *13*(3), 164–177.

Anggraini, A. F. D., Raflis, A. R., Fitri, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2024. *AKUNTANSI 45*, *7*(1), 1–9.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571.

Hafid, I. K. A., Kasmira, K., Redianto, R., & Purnamawati, P. (2025). Peningkatan kompetensi kejuruan melalui integrasi kurikulum industri di pendidikan vokasi: tinjauan literatur. *Jurnal Pendidikan Dan Profesi Keguruan*, *4*(2), 196–207.

Iskandar, A. G. (2025). Optimalisasi link and match melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, *9*(2), 4773–4791.

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 33–39.

Listianto, G. A., Fitria, R. N., & Amalia, K. (2026). MANAJEMEN HUMAS DALAM MEMBANGUN KOLABORASI SEKOLAH DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, *15*(1), 149–163.

Malik, R. R., & Ilma, R. Z. (2024). Analisa Peran Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Di BPVP Bandung Barat). *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, *7*(1), 815–821.

Maris, A. W. I., & Rahmi, I. (2022). Strategi lembaga pendidikan tinggi inklusif dalam meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa difabel: Praktik baik di Indonesia. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, *1*, 106–115.

Nurmaya, R. (2025). Peran struktur organisasi dalam efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan di perusahaan manufaktur. *Journal of Business Economics and Management| E-ISSN: 3063-8968*, *1*(4), 1063–1069.

Pratama, M. M., & Hendrawan, L. (2024). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PDRB DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2014-2023. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(2), 155–162.

Rachman, J. A., & Huda, S. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, *5*(1), 63–77.

Satria, D., & Wibowo, J. M. (2021). Peran klaster pariwisata terhadap ekonomi kreatif kabupaten banyuwangi di era industri 4.0. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, *15*(2), 134–147.

Saweho, F. F., Celia, V., & Handoko, T. W. (2025). Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB): Efektivitas dalam Meningkatkan Kapabilitas Mahasiswa Sebelum Memasuki Dunia Kerja. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(1), 38–44.

Setiyani, A., Judijanto, L., Nurmalita, N., Irianto, I., Aryani, L., Fatubun, R. R., Afriyanto, D. F., Sondari, M. C., Cipta, E. S., & Merung, A. Y. (2026). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Silayar, K., Sartika, I., & Mulyati, D. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, *6*(2), 859.

Sobari, M., Wahyudin, D., & Dewi, L. (2023). Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum pada tingkat SMK. *Jurnal Education and Development*, *11*(3), 230–238.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Alphabet.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, *5*(3), 110–116.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1), 53–61.

Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, *3*(1), 1–12.

Wrahatnolo, T., Rahayu, G. B., Anisa, S., Permata, T. W. I., & Khotimah, K. (n.d.).

Transformational leadership dalam manajemen pendidikan vokasi. Smart Global Nusantara.

Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Teknik, tantangan dan solusinya. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, *3*(6), 107–118.